BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Teori Atribusi

Teori Atribusi yang dikemukakan oleh Harold Kelley (1972) merupakan teori perkembangan dari Fritz Heider (1958) dalam Mumu et al (2020) yang menjelaskan terkait proses pengamatan perilaku dari suatu individu terhadap individu lainnya, sehingga mengetahui faktor yang telah mempengaruhi perilaku tersebut. Toeri atribusi memprediksi seseorang akan berusaha untuk mencari tahu alasan mengapa seorang individu melakukan aktivitas yang mereka jalani, dalam penerapannya asumsi ini menjelaskan bahwa fenomena atau faktor apa yang akan mempengaruhi sikap manusia. Dalam teori atribusi digambarkan bagaimana diri sendiri (internal) dan sikap dari orang lain (eksternal) dapat mempengaruhi perilaku atau tindakan seseorang. Perilaku yang disebabkan secara internal merupakan perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi seorang individu. Perilaku yang disebabkan secara eksternal merupakan perilaku yang dianggap sebagai akibat dari sebab-sebab luar, yaitu individu secara tidak langsung atau dianggap telah dipaksa berperilaku demikian oleh situasi.

Keterkaitan antara teori atribusi dengan penelitian yang dilakukan adalah bagaimana cara wajib pajak pelaku UMKM menetukan kepatuhan pajaknya yang dapat dipengaruhi oleh faktor dari dalam diri wajib pajak (internal) dan faktor dari luar wajib pajak (eksternal). Dalam menentukan suatu perilaku ditimbulkan akibat dari faktor internal dan eksternal didasarkan oleh beberapa faktor berikut:

- 1. Kekhususan, artinya bahwa setiap perilaku seseorang dapat berbeda tergantung pada setiap situasi yang berbeda. Jika perilaku yang diperlihatkan terkesan biasa, maka diakibatkan secara internal, sebaliknya jika perilaku yang diperlihatkan berlebihan, maka diakibatkan oleh eksternal.
- 2. Konsensus, artinya dihadapkan pada kondisi yang sama maka menghasilkan perilaku yang sama. Jika konsensus rendah maka dipengaruhi secara internal, sebaliknya jika tinggi diakibatkan oleh eksternal.
- 3. Konsistensi, artinya seseorang memperlihatkan perilaku yang sama. Semakin konsisten maka dipengaruhi secara internal, sedangkan tidak konsisten maka dipengaruhi dari eksternal (Mumu *et al*, 2020).

Wajib pajak yang patuh dalam membayar pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yang memotivasinya, baik faktor dari dalam ataupun dari luar. Seperti halnya pada kepatuhan wajib pajak, faktor dari dalam diri wajib pajak yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak adalah pemahaman pajak dan tingkat penghasilan, sedangkan faktor dari luar seperti tarif pajak yang berasal dari kebijakan pemerintah yang wajib dipatuhi oleh wajib pajak

2.1.2 Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib terhadap penerimaan negara, yang dipungut oleh pemerintah atas penghasilan wajib pajak dan keuntungan usaha atau nilai tambah pada biaya beberapa barang, jasa, dan transaksi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Penatausahaan Perpajakan Pasal 1 angka 1, pajak didefinisikan sebagai iuran wajib kepada negara yang dibayarkan oleh orang pribadi atau badan hukum yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, tanpa memperoleh manfaat langsung dan digunakan oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pengertian pajak yang diajukan oleh para ahli antara lain sebagai berikut:

- 1. Menurut Rochmat Soemitro, pajak adalah iuran kepada rakyat kepada kas negara menurut undang-undang (yang dapat dipaksakan) tanpa mendapat jasa timbal balik yang dapat ditunjukkan secara langsung dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi ini kemudian dikoreksi menjadi: Pajak adalah peralihan kekayaan dari rakyat ke kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk tabungan masyarakat yang menjadi sumber utama pembiayaan investasi publik;
- 2. Menurut Edwin R.A Seligmen dalam Essays in Taxation, pajak adalah iuran wajib dari seseorang kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang dikeluarkan untuk kepentingan bersama, tanpa mengacu pada manfaat khusus yang diberikan:
- 3. Definisi lain yang diberikan oleh Ray M. Sommerfeld, M. Herschel Anderson, & Horace R Brock, menurut mereka pajak adalah transfer sumber daya dari sektor swasta ke sektor pemerintah, yang bukan merupakan akibat dari pelanggaran hukum, tetapi harus dilaksanakan. Berdasarkan ketentuan di muka, tanpa memperoleh hasil yang langsung dan proporsional, pemerintah dapat menjalankan tugasnya dalam menjalankan pemerintahan;
- 4. Philip E. Taylor, dalam The Economic of Public Finance, mendefinisikan pajak sebagai kontribusi wajib dari seseorang, kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang dikeluarkan untuk kepentingan bersama, dengan sedikit mengacu pada manfaat khusus yang diberikan;
- 5. Pajak didefinisikan oleh Hugh Dalton, sebagai kontribusi wajib yang dikenakan oleh otoritas publik, terlepas dari jumlah pasti layanan yang diberikan kepada wajib pajak sebagai imbalannya, dan tidak dikenakan sebagai hukuman untuk pelanggaran hukum apa pun;
- 6. Sedangkan menurut Adam Smith, Pajak adalah pembayaran wajib yang dipungut oleh pemerintah kepada orang pribadi atau perusahaan untuk memenuhi pengeluaran yang diperlukan untuk kesejahteraan umum.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa ada lima unsur utama pajak sebagai berikut:

- 1. Iuran masyarakat kepada negara;
- 2. Berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dalam arti walaupun Negara berhak untuk memungut pajak, tetapi pelaksanaannya harus mendapat persetujuan rakyat melalui peraturan perundang-undangan;
- 3. Tanpa ada timbal balik (prestasi) Negara yang dapat langsung ditentukan dalam arti bahwa kontra-kinerja yang disediakan oleh Negara kepada rakyatnya tidak dapat dikaitkan secara langsung dengan besarnya pajak yang dibayarkan;
- 4. Untuk membiayai pengeluaran pemerintah umum.

Pajak berfungsi sebagai sumber keuangan negara (budgetair) tetapi pajak sebenarnya juga mempunyai fungsi yang lebih luas (regulerend) dalam arti pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara di bidang ekonomi dan sosial. Dengan fungsi selanjutnya, pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu yang terletak di luar bidang keuangan, seperti mengundang penanaman modal dari dalam negeri maupun luar negeri. Pemerintah daerah dapat memberikan berbagai kemudahan fasilitas perpajakan kepada investor. Dengan kemudahan atau fasilitas perpajakan, maka akan memberikan daya pikat bagi para investor untuk menanamkan modalnya di daerah ini.

Pajak dapat didefinisikan sebagai iuran untuk bisa dengan cara dipaksa yang terutang oleh yang wajib pajak dan membayarnya menurut peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan guna pajak yaitu untuk membiayai pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah (Atasia, 2022).

Pajak merupakan sumber pendapatan utama dalam meningkatkan perekonomian. Dalam meningkatkan perekonomian, pajak berperan dalam menyediakan fasilitas yang dibutuhkan masyarakat dan membantu jalannya pemerintahan. Jika digunakan sebagai persentase, tujuh puluh persen penerimaan negara berasal dari pajak. Oleh karena itu pajak sangat penting bagi jalannya pemerintahan terutama dalam bidang perekonomian, tanpa pajak perekonomian negara tidak dapat berjalan dengan baik.

Pajak berfungsi sebagai sumber keuangan negara (budgetair) tetapi pajak sebenarnya juga mempunyai fungsi yang lebih luas (regulerend) dalam arti pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara di bidang ekonomi dan sosial. Dengan fungsi selanjutnya, pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu yang terletak di luar bidang keuangan, seperti mengundang penanaman modal dari dalam negeri maupun luar negeri. Pemerintah daerah dapat memberikan berbagai kemudahan fasilitas perpajakan kepada investor. Dengan kemudahan atau fasilitas perpajakan, maka akan memberikan daya pikat bagi para investor untuk menanamkan modalnya di daerah ini.

Dalam undang-undang negara republik indonesia nomor 28 tahun 2007 undangundang 01, pajak ditetapkan atas iuran melalui kewajiban yang harus dibayar oleh orang pribadi atau badan kepada kas negara dengan tidak ada imbalan di atasnya. Tujuan pemungutan pajak akan didedikasikan untuk kemakmuran rakyat secara optimal. Pajak memiliki beberapa fungsi, antara lain: penganggaran, reguler, Alokasi, dan distribusi. Dari fungsi Pajak dapat dikatakan bahwa sebenarnya Pajak telah ikut mengatur tatanan perekonomian negara, karena tidak semua pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat hanya menjadi milik pemerintah pusat, akan tetapi ditujukan untuk pemerintah daerah dan ada Pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat tetapi hasilnya dibagi dengan pemerintah daerah.

Jenis Pajak Pusat meliputi PPh, PPN, PPn-BM sedangkan Pajak Daerah dibedakan antara Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Sistem pemungutan pajak di Indonesia menganut Self Assessment System dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya, hal ini berarti pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak.

2.2 Kajian Variabel Penelitian

2.2.1 Pemahaman Pajak

Menurut Putri (2020) Pemahaman adalah proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan sesuatu. Pemahaman perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan perundang-undangan serta tata cara perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya.

Dalam pengertian lain, pemahaman adalah berbagai gejala yang ditemui dan diperoleh manusia melalui pengamatan indera. Pemahaman muncul ketika seseorang menggunakan akalnya untuk mengenali objek atau peristiwa tertentu yang belum pernah dilihat atau dirasakan sebelumnya. Pengetahuan adalah sesuatu yang diketahui berhubungan dengan proses belajar.

Menurut Saadah (2021) rasa patuh timbul setelah wajib pajak telah mengetahui dan mengaplikasikannya untuk taat membayar pajak, sehingga diartikan bahwa wajib pajak telah memiliki pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak yang baik. Pendapat tersebut sejalan dengan (Siti Resmi, 2019) menyatakan bahwa wajib pajak yang memiliki pengetahuan dan memahami tentang ketentuan dan tata cara perpajakan (KUP) yang mencakup tata cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT), tempat dan pembayaran pajak, sanksi pajak, dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT.

Pengertian wajib pajak sejalan dengan wajib pajak yaitu pengetahuan tentang wajib pajak adalah kewajiban dan haknya. Wajib Pajak memiliki kewajiban seperti mendaftar untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak, menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar, dan mengisi SPT dengan benar. Dalam melaksanakan suatu kewajiban, wajib pajak juga memiliki hak, antara lain hak untuk mengajukan keberatan dan surat banding, menerima bukti pemasukan SPT, mengoreksi SPT yang dimasukkan, dan mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT.

2.2.2 Tingkat Penghasilan

Dalam UU No.36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (1) disebutkan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama, dan dalam bentuk apapun. Artinya, semakin tinggi tingkat penghasilan semakin besar jumlah yang dapat dikonsumsi atau diinvestasikan. Penghasilan atau pendapatan dapat di artikan dengan sejumlah uang yang diterima oleh seseorang dalam jangka waktu tertentu dari pekerjaan utama maupun sampingan (Rahman, 2018).

Secara teoritis, aspek penghasilan para wajib pajak ialah landasan bagi pelaksanaan kewajiban wajib pajak. Bagi sebagian besar UMKM, pajak masih dianggap sebuah "beban dan "biaya" yang harus ditanggung dalam kegiatan ekonominya. Oleh karena itu, kebanyakan masyarakat lebih cenderung untuk memenuhi kebutuhan pokoknya terlebih dahulu. Besarnya penghasilan akan mampu mempengaruhi kesadaran dan kepatuhan dalam ketentuan hukum dan kewajibannya. Penghasilan wajib pajak diterapkan sebagai objek pada pajak penghasilan guna menentukan besarnya pajak yang terutang. Akibatnya, tingkat pendapatan wajib pajak akan berdampak pada kepatuhannya.

Tingkat penghasilan termasuk dalam faktor ekonomi, di mana faktor ekonomi ini menjadi alasan penting bagi wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya. Hasnizar et al. (2020) mengatakan tingkat patuhnya wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sangat dipengaruhi oleh besarnya pendapatan yang diterima. Pasalnya, jika penghasilan yang diterima wajib pajak tersebut rendah, dapat berdampak pada ketelatan pembayaran pajak. Hal ini bisa terjadi karena wajib pajak tersebut cenderung akan lebih memilih untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dahulu dari pada harus membayar pajaknya tepat waktu.

2.2.3 Tarif Pajak

Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 hanya mengatur tentang penetapan batas bawah dan batas atas tarif pajak kendaraan bermotor pribadi. Sedangkan kepastian penetapan tarif pajak kendaraan bermotor diatur berdasarkan peraturan daerah di masing-masing provinsi.

Menurut Mardiasmo (2019) ada 4 (empat) jenis tarif pajak yaitu:

- 1. Tarif pajak tetap, yaitu pengenaan pajak dengan tarif pajak yang besar nominalnya selalu tetap.
- 2. Tarif pajak proporsional/sebanding, artinya penggunaan persentase tetap tanpa memperhatikan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Pajak yang wajib dibayar sebanding dengan DPP.
- 3. Tarif pajak degresif, yaitu pengenaan tarif dengan jumlah persentase yang semakin kecil apabila DPP menurun.

4. Tarif pajak progresif, yaitu tarif yang persentasenya semakin besar apabila Dasar Pengenaan Pajaknya meningkat

Untuk tarif pajak bagi pelaku usaha, pemerintah menetapkan tidak adanya perbedaan tarif pajak bagi pelaku usaha dengan transaksi melalui online ataupun offline (Rizkina, 2020). Namun, pemerintah menginginkan partisipasi bagi pelaku usaha online untuk menyetor sebagian kecil dari pajak yang terutang atas transaksi yang dilakukan. Bagi pelaku usaha online (e-commerce) akan dikenakan pajak penghasilan (PPh) sesuai dengan PP No. 46 Tahun 2013, yaitu Peraturan Pemerintah yang mengatur terkait Pajak Penghasilan (PPh) yang dihasilkan melalui usaha yang diperoleh wajib pajak dengan kepemilikan peredaran bruto tertentu. Dengan objek pajak yang dikenakan adalah penghasilan yang diperoleh melalui usaha yang diterima dengan penghasilan bruto kurang dari 4,8 miliar dalam satu 25 tahun pajak dengan pengenaan tarif Pajak Penghasilan (PPh) final sebesar 1% dari jumlah bruto.

Saat ini, PP No. 23 Tahun 2018 merupakan wujud peraturan baru dari PP No. 46 Tahun 2013 dengan adanya perubahan ketentuan, yaitu objek pajak yang dikenakan adalah pendapatan yang dihasilkan wajib pajak melalui usaha dan memiliki penghasilan bruto dalam satu tahun pajak kurang dari 4,8 miliar yang dikenakan tarif PPh final sebesar 0,5%. Sedangkan, bagi pelaku usaha online (e-commerce) yang memiliki jumlah penghasilan bruto mencapai 4,8 miliar dalam satu tahun pajak, maka akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dalam peraturan terbaru, yaitu UU Harmonisasi Perpajakan atau UU HPP Pasal 7 ayat 2a yang menyatakan bahwa tarif Pajak Penghasilan (PPh) pengusaha perorangan yang menggunakan perhitungan PPh dengan tarif final 0,5% berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2018 dan memiliki omzet maksimal Rp. 500.000.000 tidak dikenakan PPh.

2.2.4 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan secara bahasa memiliki arti sifat disiplin, ketaatan, dan patuh terhadap peraturan yang berlaku. Kepatuhan dalam seorang wajib pajak menjadi dasar penilaian keberhasilan penerimaan negara dalam sektor perpajakan. Hama (2021) mengatakan "Wajib pajak dapat dikatakan taat dan patuh, apabila kewajiban dan hak perpajakan telah terpenuhi." Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan wujud dari ketaatan wajib pajak yang telah melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuai 33 dengan peraturan undang - undang perpajakan yang telah ditetapkan (Putra dan Waluyo, 2020). Semakin wajib pajak taat dan patuh dengan peraturan perpajakan, maka semakin meningkat penerimaan kas negara melalui sektor perpajakan.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan. Sikap wajib pajak yang memiliki tanggung jawab tidak hanya takut akan sanksi, hukum perpajakan yang berlaku, dan wajib pajak yang menyampaikan SPT tepat waktu.

Menurut Hama (2021) terdapat 2 (dua) jenis kepatuhan wajib pajak, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan materi. Kepatuhan formal adalah keadaan dimana

seorang wajib pajak secara formal memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Berdasarkan Depkeu No. 544/KMK.04/2000, wajib pajak masuk dalam kategori kepatuhan pajak jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1. Tepat waktu dalam menyampaikan pemberitahuan untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
- 2. Tidak memiliki tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin angsuran atau menunda pembayaran pajak.
- 3. Tidak pernah dipidana karena membawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ketentuan umum peraturan perundang-undangan dan tata cara perpajakan (UU KUP), dan dalam hal Wajib Pajak tidak pernah melakukan pemeriksaan, pembetulan pemeriksaan terakhir untuk setiap jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.

Menurut Putri (2021) terdapat beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya atau menurunya kepatuhan wajib pajak, yaitu sebagai berikut:

- 1. Wajib pajak merasa kurang puas terhadap pelayanannya.
- 2. Pembangungan infrastruktur yang tidak merata, membuat kepercayaan wajib pajak menjadi berkurang. Karena, masih kurang merasakan manfaat dari pajak yang telah dibayar.
- 3. Masih adanya kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat tinggi.

Menurut Rahayu (2020), terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, yaitu sebagai berikut:

- 1. Kondsi sistem administrasi perpajakan suatu negara Melalui perbaikan sistem administrasi perpajakan diharapkan wajib pajak lebih termotivasi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Jika sistem ini telah diperbaiki maka faktor-faktor lain akan terpengaruh.
- 2. Pelayanan pada wajib pajak
 - Jika sistem administrasi dalam keadaan baik tentunya instansi pajak, sumber daya aparat pajak dan prosedur perpajakannya juga dalam keadaan baik, sehingga kualitas pelayanan yang diberikan juga akan semakin baik dan ini akan berdampak pada sukarelawan wajib pajak dalam membayar pajaknya.
- 3. Penegakan hukum perpajakan dan pemeriksaan pajak Wajib pajak akan patuh terhadap pajak karena adanya tekanan, mereka berpikir akan mendapat sanksi yang berat, jika hukum pajak yang diterapkan dalam negara tersebut benar-benar tegas.
- 4. Tarif pajak

Penurunan tarif akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, dengan tarif pajak yang rendah maka pajak yang dibayar tidak banyak dan tentunya tidak memberatkan.

2.2.5 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Undang-undang nomor 20 Tahun 2008 mengemukakan berbagai definisi yang mengklarifikasikan entitas berlandaskan pengamatan dua aspek yakni kekayaan bersih (aset) serta outpu penjualan (omset). Usaha mikro adalah badan usaha produktif yang dimiliki oleh individu atau badan usaha kecil. Selain itu, usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang beroperasi secara mandiri serta dijalankan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak badan usaha atau cabang badan usaha yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian dari usaha menengah atau usaha besar, baik langsung maupun tidak langsung. Sementara usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri serta dijalankan oleh orang atau badan hukum yang bukan merupakan anak badan usaha yang dimiliki, sikuasai, atau bergabung dengan usaha kecil atau besar, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Tabel 2.1 Kriteria UMKM

Kriteria	Mikro	Kecil	Menengah
Aset	Paling banyak Rp.	Rp. 50.000.000 – Rp.	Rp. 500.000.000 - Rp.
	50.000.000	300.000.000	10.000.000.000
Omset	Paling banyak Rp.	Rp. 300.000.000 – Rp.	Rp. 2.500.000.000 – Rp.
	300.000.000	2.500.000.000	10.000.000.000

Sumber: Undang-undang nomor 20 tahun 2008

2.3 Penelitian Terdahulu dan Kerangka Penelitian

2.3.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya untuk mencari peneliti, perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya disamping itu kajian terdahulu membantu penelitian dalam memposisikan penelitian serta menunjukkan orisinalitas dari penelitian. Penulis mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak penulis lakukan yaitu meliputi variabel Pemahaman Perpajakan, Tingkat Penghasilan, dan Tarif Pajak. Berikut tabel penelitian terdahulu:

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti,	Variabel yang	Indikator	Metode	Hasil Penelitian
	Tahun & Judul	diteliti		Analisis	
	Penelitian				
1.	Pengaruh	Variabel	Ordinal:	Probability	Tujuan penelitian ini
	Pemahaman	Independen:	Pemahaman	sampling	adalah untuk
	Perpajakan,	Pemahaman	peraturan	mengguna	mengetahui pengaruh
	Sanksi Pajak,	Perpajakan,	perpajakan	kan rumus	pemahaman
	Tarif Pajak, dan	Sanksi Pajak,		slovin.	perpajakan, sanksi
	Kualitas	Tarif Pajak,	Pengetahuan		perpajakan, tarif pajak,
	Pelayanan	dan Kualitas	atas		dan kualitas pelayanan
	terhadap	Pelayanan			terhadap kepatuhan

_	T .	1	1	ı	T
	Kepatuhan		peraturan		wajib pajak UMKM.
	Wajib Pajak	Variabel	perpajakan		Penelitian ini
	UMKM	Dependen:			menggunakan objek
		Kepatuhan	Persepsi		wajib pajak UMKM di
	Nafidha Anis	Wajib Pajak	masyarakat		Kabupaten Demak.
	Maili (2022)	UMKM	terhadap		Sampel dalam
	With (2022)	Civilan	hukuman		penelitian ini terdiri
			atas		dari 115 responden
			pelanggaran		wajib pajak UMKM di
			dalam		Kabupaten Demak
			perpajakan		yang ditentukan
					dengan menggunakan
			Ketaatan		rumus Slovin. Analisis
			atau sikap		data menggunakan uji
			patuh wajib		statistik deskriptif dan
			pajak dalam		uji regresi linier
			membayar		berganda dengan
					bantuan SPSS 19.
			pajak		
					Penelitian ini
					membuktikan bahwa
					pemahaman perpajakan
					dan sanksi perpajakan
					berpengaruh positif
					signifikan terhadap
					kepatuhan wajib pajak
					UMKM, selain itu tarif
					pajak dan kualitas
					pelayanan tidak
					berpengaruh signifikan
					terhadap kepatuhan
					wajib pajak UMKM.
					dampak signifikan
					terhadap kepatuhan
					wajib. pajak UMKM.
2.	Pengaruh	Variabel	Ordinal:	Analisis	Penelitian ini bertujuan
	Pemahaman	Independen:	Mendaftarka	regresi	untuk mengetahui
	Perpajakan,	Pemahaman	n diri	berganda	pengaruh pemahaman
	Kesadaran	Perpajakan,	sebagai WP	(multiple	perpajakan, kesadaran
	Wajib Pajak,	Kesadaran	yaitu wajib		
			yanu wajib	regression	wajib pajak, kualitas
	Kualitas	Wajib Pajak,		analysis	pelayanan dan risiko
	Pelayanan, Dan	Kualitas	Wajib	model)	fiskus yang terdeteksi
	Risiko	Pelayanan dan	pajak		terhadap kepatuhan
	Terdeteksi	Risiko	mengetahui		wajib pajak UMKM.
	Fiskus	Terdeteksi	peraturan		Wajib pajak usaha
	Terhadap	Fiskus	perpajakan		mikro, kecil, dan
	Kepatuhan				menengah (UMKM) di
	Wajib Pajak	Variabel	Sadar serta		Banda Aceh
	Umkm (Studi	Dependen:	tidak		merupakan
	Pada Wajib	Kepatuhan	merasa		respondennya. Data
	Pajak Umkm Di	Wajib Pajak	terpaksame		dikumpulkan melalui
	Kota Banda	UMKM	mbayar		kuesioner. Analisis
	Aceh)		pajak		data menggunakan
					metode regresi linier
	Riska Faradhila		Melayani		berganda, uji parsial
	dan Wida		dengan		(uji t), dan uji simultan
	Fadhlia (2018)		tepat dan		(bersama-sama),
			cepat		sedangkan pengolahan
			P		data menggunakan
<u></u>	<u>I</u>	<u>I</u>	1	I	and monggunakun

	Т	T	T	1	
3.	Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Pajak Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UKM Kota Jambi Fitrini Mansur, Reka Maiyarni, Eko Prasetyo, dan Riski Hernando (2022)	Variabel Independen: Pengetahuan Pajak, Kesadaran Pajak, dan Tarif Pajak Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak UKM Kota Jambi	Ordinal: Pengetahuan atas ketentuan perpajakan Tarif pajak profosional Mengetahui adanya undang- undang dan ketentuan perpajakan	Analisis regresi berganda (multiple regression analysis)	SPSS 23. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, pelayanan kualitas, dan risiko fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM secara simultan, (2) deteksi pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, (3) deteksi kesadaran wajib pajak UMKM, (4) kualitas deteksi pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, (5) risiko fiskus terdeteksi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, (5) risiko fiskus terdeteksi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak terhadap kewajibannya membayar pajak. Konsep teoritis yang diujikan adalah pengetahuan perpajakan, dan tingkat kepatuhan pajak. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner terhadap 100 usaha kecil menengah di bidang percetakan dan sablon. Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, kesadaran perpajakan, kesad
					Penelitian ini dapat membantu pemerintah

					dalam menentukan kebijakan yang
					diperlukan untuk meningkatkan
					kepatuhan pajak. Hasil
					tersebut menunjukkan bahwa pemerintah
					perlu meningkatkan
					kesadaran perpajakan
					dan perhatian terhadap tarif pajak untuk
					meningkatkan
					kepatuhan pajak dalam
					memenuhi kewajiban
4.	Pengaruh	Variabel	Ordinal:	Purposive	perpajakannya. Penelitian ini bertujuan
	Perubahan Tarif	Independen:	Perubahan	sampling	untuk menguji
	Pajak, Tingkat	Perubahan	tarif pajak		pengaruh perubahan
	Pendapatan dan Pemahaman	Tarif Pajak, Tingkat	Penghasilan		tarif pajak, tingkat pendapatan dan
	Perpajakan	Pendapatan,	UMKM		pemahaman perpajakan
	Terhadap	dan	D1		terhadap kepatuhan
	Kepatuhan Wajib Pajak	Pemahaman Perpajakan	Pemahaman mengenai		wajib pajak UMKM. Populasi dalam
	UMKM di	Torpajanan	NPWP		penelitian ini adalah
	Kabupaten	Variabel			wajib pajak orang
	Gresik	Dependen: Kepatuhan	Pemahama		pribadi yang mempunyai usaha di
	Putri Pinasti	Wajib Pajak	n mengenai hak dan		Kabupaten Gresik.
	dan Nyimas	UMKM	kewajiban		Pendekatan dalam
	Wardatul Afiqoh (2023)		pajak.		penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif.
	Anqon (2023)				Teknik pengambilan
					sampel dalam
					penelitian dilakukan dengan metode
					purposive sampling diperoleh sampel
					sebanyak 58
					responden. Data yang
					digunakan adalah data primer dengan cara
					menyebarkan
					kuesioner kepada wajib
					pajak orang pribadi
					yang mempunyai usaha. Pengujian
					analisis data
					menggunakan bantuan
					aplikasi SmartPLS Versi 3.2.9. Hasil
					penelitian
					menunjukkan bahwa
					perubahan tarif pajak berpengaruh positif
					signifikan terhadap
					kepatuhan wajib pajak
					UMKM, tingkat

	1	1	1	1	mandanata
					pendapatan
					berpengaruh positif dan signifikan terhadap
					kepatuhan wajib pajak
					UMKM, dan
					pemahaman perpajakan
					berpengaruh positif
					signifikan terhadap
	D 1 5 10	**	0 11 1		kepatuhan wajib pajak.
5.	Pengaruh Tarif	Variabel	Ordinal:	Purposive	Sumber pendapatan
	Pajak, Tingkat	Independen:	Penghasilan	sampling	terbesar di Indonesia
	Penghasilan,	Tarif Pajak,	UMKM		berasal dari sektor
	Dan Kesadaran	Tingkat			pajak. Pemerintah
	Wajib Pajak	Penghasilanda	Memahami		mulai gencar
	Terhadap	n Kesadaran	bahwa		mengoptimalkan
	Kepatuhan	Wajib Pajak	kewajiban		sektor-sektor yang
	Wajib Pajak		perpajakan		berpotensi memberikan
	UMKM	Variabel	harus		kontribusi terhadap
		Dependen:	dilaksanakan		penerimaan pajak,
	Erlita Widiya	Kepatuhan	sesuai		salah satunya UMKM.
	Putri dan Sri	Wajib Pajak	dengan		Hingga saat ini,
	Trisnaningsih	UMKM	ketentuan		kepatuhan wajib pajak
	(2023)		yang		UMKM dinilai masih
			berlaku.		sangat rendah. Tujuan
			m		penelitian ini adalah
			Tidak		untuk menguji
			mengenal		pengaruh tarif pajak,
			kompromi		tingkat pendapatan,
			(Not		dan kesadaran wajib
			Arbitrary)		pajak terhadap
					kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian ini
					merupakan jenis penelitian kuantitatif.
					Data yang digunakan
					merupakan data primer
					dengan menggunakan
					analisis regresi linier
					berganda dan diolah
					menggunakan aplikasi
					SPSS. Pengumpulan
					data dilakukan dengan
					menyebarkan
					kuesioner secara
					langsung kepada
					masing-masing
					responden. Teknik
					pengambilan sampel
					yang digunakan adalah
					purposive sampling.
					Kriteria sampel dalam
					penelitian ini adalah
					UMKM yang memiliki
					NPWP. Sebanyak 33
					pelaku UMKM di
					Kecamatan Tegalsari
					memenuhi kriteria dan
					dijadikan sampel

					penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pendapatan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sedangkan tarif pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
6.	Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Luh Putu Gita Cahyani dan Naniek Noviari (2019)	Variabel Independen: Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak	Ordinal Pemahaman peraturan perpajakan Tarif pajak tinggi dapat menimbulka n kecurangan pajak Kepatuhan dalam mendaftarka n diri kekantor pajak	Accidental sampling	1. Tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP UMKM, 2. Pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP UMKM. 3. Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP UMKM. WP UMKM.
7.	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaku E- Commerce Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Putri Dwi Indriyani (2020)	Variabel Independen: Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak	Ordinal: Penyelengga raan sosialisasi Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan Sanksi perpajakan yang dikenakan bagi pelanggar aturan cukup berat Kepatuhan dalam melaporkan SPT tepat waktu	Structural Equation Modelling (SEM) berbasis Partial Least Square (PLS)	Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pelaku e-commerce dalam memenuhi kewajiban perpajakan, sanksi pajak berpengaruh positif namun tidak signifikan, serta sosialisasi perpajakan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan pelaku e-commerce dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

		ı	1	1	T
8.	Pengaruh	Variabel	Ordinal:	Analisis	Hasil penelitian ini
	Pengetahuan	Independen:	Pengetahuan	regresi	menunjukan bahwa
	Perpajakan d	Pengetahuan	atas	berganda	pengetahuan
	an Sanksi Pajak	Perpajakan	Peraturan	dengan	perpajakan
	Terhadap	dan Sanksi	Pajak	bantuan	berpengaruh terhadap
	Kepatuhan	Pajak		program	kepatuhan wajib pajak,
	Wajib Pajak		Sanksi pajak	SPSS 19	sanksi pajak juga
	UMKM	Variabel	harus		bepengaruh signifikan
	Di Jakarta	Dependen:	dikenakan		terhadap kepatuhan
		Kepatuhan	kepada		wajib pajak. Demikian
	Riyanto	Wajib Pajak	pelanggarny		juga secara bersama-
	Wujarso,	UMKM	a tanpa		sama pengetahuan
	Saprudin, dan		toleransi		perpajakan dan sanksi
	Rina Dameria				pajak berpengaruh
	Napitupulu		Kepatuhan		signifikan terhadap
	(2020)		dalam		kepatuhan wajib pajak
			menghitung		pelaku usaha mikro
			dan		kecil dan menengah.
			membayar		
			pajak		
			dengan		
			benar		
9.	Pengaruh	Variabel	Ordinal:	Library	1. Sanksi Perpajakan
	Sanksi	Independen:	Sanksi	Research	berpengaruh positif
	Perpajakan,	Sanksi	diperlukan		terhadap Kepatuhan
	Tarif Pajak Dan	Perpajakan	untuk		Wajib Pajak,
	Pemahaman	dan	menciptakan		2. Tarif Pajak
	Perpajakan	Pemahaman	rasa		berpengaruh positif
	Terhadap	Perpajakan	kedisiplinan		terhadap Kepatuhan
	Kepatuhan		dalam		Wajib Pajak
	Wajib Pajak	Variabel	membayar		3. Pemahaman
	3 3	Dependen:	pajak		Perpajakan
		Kepatuhan			berpengaruh positif
	Evline Caroline,	Wajib Pajak	Paham dan		terhadap Kepatuhan
	Idel Eprianto,		mengetahui		Wajib Pajak.
	Cris Kuntadi,		terkait hak		
	dan Rachmat		dan		
	Pramukty		kewajiban		
	(2023)		menjadi		
			wajib pajak		
			J - F - J		
			Tingkat		
			kesadaran		
			membayar		
			pajak tidak		
			ditentukan		
			dari tarif		
			pajak		
10.	Pengaruh	Variabel	Ordinal:	Purposive	Hasil penelitian
	Pemahaman	Independen:	Pengetahuan	sampling	menunjukkan bahwa
	Peraturan	Pemahaman	mengenai		Variabel pemahaman
	Perpajakan,	Peraturan	ketentuan		peraturan perpajakan
	Tarif Pajak Dan	Perpajakan,	umum dan		mempunyai pengaruh
	Sanksi Pajak	Tarif Pajak,	tata cara		positif dan signifikan
	Terhadap	Sanksi Pajak	perpajakan		pada ketaatan wajib
	Kepatuhan				pajak orang pribadi
	Wajib Pajak	Variabel	Pengenaan		UMKM, Variabel tarif
	Umkm (Studi	Dependen:	sanksi akan		pajak mempunyai

	Pada Wajib	Kepatuhan	sesuai		pengaruh positif dan
	Pajak Orang Pribadi Yang	Wajib Pajak	dengan apa saja aturan		signifikan pada ketaatan wajib pajak
	Terdaftar Di		yang		orang pribadi UMKM,
	Kpp Pratama		dilanggar		Variabel sanksi pajak
	Malang Selatan)		oleh wajib		mempunyai pengaruh
			pajak		negatif dan tidak
	Evi Rahmawati		TD: 1		signifikan pada
	Lazuardini, Hj.		Tingkat		ketaatan wajib pajak
	Jeni Susyanti,		kesadaran		UMKM.
	dan Achmad Agus Priyono		membayar pajak tidak		
	(2018)		ditentukan		
	(2010)		dari tarif		
			pajak		
11.	Pengaruh	Variabel	Ordinal:	purposive	1. Pemahaman
	Pemahaman	Independen:	Kepatuhan	sampling	perpajakan tidak
	Perpajakan,	Pemahaman	untuk		berpengaruh
	Tingkat	Perpajakan,	melakukan		signifikan terhadap
	Penghasilan,	Tingkat	pendaftaran		kepatuhan wajib
	Kesadaran	Penghasilan,	diri		pajak, sedangkan
	Wajib Pajak	dan Kesadaran			2. tingkat penghasilan
	Terhadap	Wajib Pajak	Pelaku		dan kesadaran
	Kepatuhan	X7 1 1	UMKM		wajib pajak
	Wajib Pajak	Variabel	melaporkan		berpengaruh
	Nadhila Tri	Dependen: Kepatuhan	penghasilan sesuai		signifikan terhadap kepatuhan wajib
	Rachmawati	Wajib Pajak	kenyataan		pajak.
	dan Tantina	wajio i ajak	Kenyataan		pajak.
	Haryati		pelaku		
	(2021)		UMKM		
			sadar		
			dengan		
			undang-		
			undang dan		
			ketentuan		
10	D 1	X7 ' 1 1	dalam paja	N.T.	TT '1 1'.' ' '
12.	Pengaruh	Variabel	Ordinal:	Non Random	Hasil penelitian ini
	Pemahaman Perpajakan,	Independen: Pemahaman	peraturan umum dan	Sampling	bahwa pemahaman perpajakan
	Tarif Pajak,	Perpajakan,	aturan	Samping	berpengaruh terhadap
	Dan Sanksi	Tarif Pajak,	perpajakan		kepatuhan Wajib
	Perpajakan	dan Sanksi	r r ujunum		Pajak UMKM,
	Terhadap	Perpajakan	Penurunan		sedangkan tarif pajak
	Kepatuhan		tarif		dan sanksi perpajakan
	Wajib Pajak	Variabel	Pajak		tidak memberi
	(Studi	Dependen:			pengaruh terhadap
	Pada	Kepatuhan	Memahami		kepatuhan Wajib Pajak
	Pelaku Umkm	Wajib Pajak	sanksi		UMKM.
	Kecamatan		perpajakan		
	Ngaliyan		memahami		
1	Semarang)		jangka		
	Shevia Kumala		waktu		
	Sari dan Rr.		dalam		
	Tjahjaning		pelaporan		
	Poerwati				
	(2023)				

13.	Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Umkm Yang Berada Di Kota Bogor) Putri Andari Rusanti (2021)	Variabel Independen: Pemahaman Akuntansi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak	Ordinal: Memahami metode/peng ukuran yang diperkenank an oleh perpajakan. Memahami kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku dan dapat dipaksakan. Mendaftarka n diri (NPWP)	non-probability sampling	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial pemahaman akuntansi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Bogor, kemudian kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Bogor. Begitupula, secara bersama-sama (simultan) pemahaman akuntansi pajak dan kesadaran wajib pajak secara bersama-sama (simultan) memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak secara bersama-sama (simultan) memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Artinya, pemahaman akuntansi pajak dan kesadaran wajib pajak dapat menjelaskan kepatuhan wajib pajak sebesar 49%. Kemudian sisanya 51% dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

Dari penelitian sebelumnya terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan penulis teliti yang meliputi variabel independen, variabel dependen, periode data yang diteliti, metode yang digunakan dan lokasi penelitian.

Pada penelitian ini memiliki persamaan pada variabel independen yaitu pemahaman perpajakan dengan penelitian milik (Nafidha Anis Maili, 2022), (Riska Faradhila dan Wida Fadhlia, 2018), (Luh Putu Gita Cahyani dan Naniek Noviari, 2019), (Putri Dwi Indriyani, 2020), (Riyanto Wujarso, Saprudin, dan Rina Dameria Napitupulu, 2020), (Evline Caroline, Idel Eprianto, Cris Kuntadi, dan Rachmat Pramukty, 2023), (Evi Rahmawati Lazuardini, Hj. Jeni Susyanti, dan Achmad Agus Priyono, 2018), (Nadhila Tri Rachmawati dan Tantina Haryati, 2021), (Shevia Kumala Sari dan Rr. Tjahjaning Poerwati, 2023), dan (Putri Andari Rusanti, 2021). Persamaan variabel tingkat penghasilan dengan penelitian milik (Putri Pinasti dan Nyimas Wardatul Afiqoh, 2023), (Erlita Widiya Putri dan Sri Trisnaningsih, 2023),

dan (Nadhila Tri Rachmawati dan Tantina Haryati, 2021). Persamaan variabel tarif pajak dengan penelitian millik (Nafidha Anis Maili, 2022), (Fitrini Mansur, Reka Maiyarni, Eko Prasetyo, dan Riski Hernando, 2022), (Putri Pinasti dan Nyimas Wardatul Afiqoh, 2023), (Erlita Widiya Putri dan Sri Trisnaningsih, 2023), (Luh Putu Gita Cahyani dan Naniek Noviari, 2019), (Evline Caroline, Idel Eprianto, Cris Kuntadi, dan Rachmat Pramukty, 2023), Evi Rahmawati Lazuardini, Hj. Jeni Susyanti, dan Achmad Agus Priyono, 2018), (Shevia Kumala Sari dan Rr. Tjahjaning Poerwati, 2023). Sedangkan terdapat perbedaan lokasi penelitian yaitu UMKM Pasar Citeureup Kabupaten Bogor dengan semua peneliti.

2.3.2 Kerangka Penelitian

2.3.2.1 Pengaruh Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Penelitian Nafidha Anis Maili (2022) menjelaskan membuktikan bahwa pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang analisis data menggunakan uji statistik deskriptif dan uji regresi linier berganda dengan bantuan SPSS 19.

Hasil penelitian Riska Faradhila, Wida Fadhlia (2018) menjelaskan bahwa pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, pelayanan kualitas, dan risiko fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM secara simultan, dengan Analisis data menggunakan metode regresi linier berganda, uji parsial (uji t), dan uji simultan (bersama-sama), sedangkan pengolahan data menggunakan SPSS 23.

2.3.2.2 Pengaruh Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Penelitian Erlita Widiya Putri dan Sri Trisnaningsih (2023) menunjukkan bahwa tingkat berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, dengan menggunakan analisis regresi linier berganda dan diolah menggunakan aplikasi SPSS.

Penelitian Putri Pinasti dan Nyimas Wardatul Afiqoh (2023) tingkat pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, yang pengujian analisis datanya menggunakan bantuan aplikasi SmartPLS Versi 3.2.9.

2.3.2.3 Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

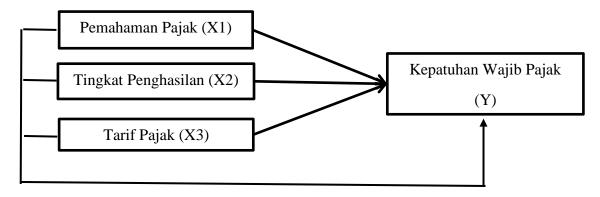
Berdasarkan hasil penelitian Fitrini Mansur; Reka Maiyarni; Eko Prasetyo; Riski Hernando (2022) mengemukakan bahwa tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dan menggunakan analisis regresi berganda untuk menguji hipotesis.

Penelitian Putri Pinasti dan Nyimas Wardatul Afiqoh (2023) menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang metode analisis datanya menggunakan Pengujian analisis data menggunakan bantuan aplikasi SmartPLS Versi 3.2.9.

2.3.2.4 Pengaruh Pemahaman Pajak, Tingkat Penghasilan, dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Pemahaman pajak, tingkat penghasilan, dan tarif pajak merupakan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi ketidakpatuhan wajib pajak. Saat pemahaman yang masih kurang, maka akan mendorong wajib pajak untuk tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Ketika, tarif pajak yang ditetapkan tidak sesuai dan tidak tegas, maka berdampak pada wajib pajak enggan untuk membayar pajak. Tingkat penghasilan menjadi alasan penting wajib pajak patuh dalam melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak, hal ini dapat terjadi karena semakin tinggi tingkat penghasilan yang diterima wajib pajak, akan semakin besar kemungkinan wajib pajak tersebut dapat menyisihkan penghasilannya untuk membayar pajak.

Semua faktor tersebut menjadi penting, karena dalam melaporkan dan membayarkan pajak di indonesia menerapkan *self assesment system*, sehingga wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya secara mandiri. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Saadah (2021) yang memiliki hasil penelitian bahwa pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, pelayanan fiskus berpengaruh secara signifikan bersama – sama (simultan) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Artinya bahwa dengan pengetahuan dan pemahaman pajak yang meningkat, maka akan berdampak pada peningkatan kepatuhan wajib pajak



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kerangka berpikir diatas, peneliti bermaksud untuk menjelaskan bagaimana pemahaman pajak, tingkat penghasilan dan tarif pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak bagi UMKM di Pasar Citeureup, Kabupaten Bogor. Untuk menguji hal tersebut peneliti merumuskan sebuah hipotesis sebagai berikut:

2.4 Hipotesis Penelitian

Suatu Topik penelitian perlu dikembangkan, hipotesis penelitian jika analisis permasalahan menggunakan statistik uji hipotesis. Hipotesis penelitian adalah dugaan

sementara terhadap identifikasi masalah penelitian. Berdasarkan penjelasan mengenai kerangka pemikiran dan penelitian sebelumnya, maka hipotesis penelitian yang diajukan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

- H1: Pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
- H2: Tingkat penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
- H3: Tarif Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
- H4: Pemahaman pajak, tingkat penghasilan, dan tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.